



**# bangga
melayani
bangsa**
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

Nomor : 000.7.5/2009/300.05



TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023, dapat diselesaikan laporan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam LKJIP ini termuat gambaran hasil capaian kinerja semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja di awal tahun selama kurun waktu satu tahun.

LKJIP ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam mencapai visi dan misinya.

Pada akhirnya semoga LKJIP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh jajaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi bagian dari Instansi teknis Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,





RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya membantu kepala daerah untuk menjalankan Visi dan Misi Kota Samarinda agar dapat terwujud.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian LKJIIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai media informasi dan komunikasi sekaligus bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Samarinda, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,



SUCIPTO, S.Pd,M.Si.

NIP.196703191997021003

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIIP) TAHUN 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum	
1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
2. Struktur Organisasi	4
3. Sumber Daya Manusia	6
4. Sarana dan Prasarana	8
E. Isu Strategis	
1. Aspek strategis Organisasi	8
2. Permasalahan Utama	9
a. Faktor Internal	10
b. Faktor Eksternal	10
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	14
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026	17
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	18
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	21



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi	24
2. Akuntabilitas Keuangan	43
1. Realisasi Anggaran Tahun 2023	43
2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
a. Efisiensi Serapan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja	46
b. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 ...	49
BAB IV PENUTUP	65





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021-2026 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Selain itu, Laporan Kinerja ini sebagai bentuk perwujudan untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan



sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang dipergunakan sebagai modal dasar didalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;



8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menjabarkan Renstra serta untuk pelaksanaan TUFOKSI dimasing-masing Perangkat Daerah adapun Tujuannya :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur baik yang telah dilaksanakan atau sebelumnya kepada kepala Daerah.
2. Meningkatkan kinerja OPD untuk lebih optimal dalam pelayanan atau perbaikan penyelenggaraan Pemerintah.

D. GAMBARAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan,



pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, \agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis propinsi

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

2. Struktur Organisasi

1. Susunan Organisasi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekertaris
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan



f. Bidang Politik Dalam Negeri

g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)

Penjelasan :

a. Kepala Badan

b. Sekertaris

membawahi :

1) Subbag Umum dan Kepegawaian

2) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

3) Jafung Perencana Ahli Muda

c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

membawahi :

1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi

2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Wawasan Kebangsaan

d. Bidang Kewaspadaan Nasional

membawahi :

1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing

2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

membawahi :

1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Seni dan Budaya

2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi

f. Bidang Politik Dalam Negeri

membawahi :

1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu



3. Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023, memiliki jumlah pegawai sebanyak 73 orang, yang terdiri dari 39 orang PNS, 14 orang PTTB, dan 20 orang PTTH. Untuk mengetahui gambaran umum komposisi aparatur adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	CPNS	PTTB	PTTH	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-	-	-	-	0
2.	SLTP	1	-	-	-	1	1
3.	SLTA	15	-	5	11	31	31
4.	D.I	-	-	-	-	-	0
5.	D.II	-	-	-	-	-	0
6.	D.III	2	-	-	-	2	2
7.	Sarjana (S1)	16	-	9	9	34	34
8.	Pasca Sarjana (S2)	5	-	-	-	5	5
Jumlah		39	-	14	20	73	73

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

2. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	-	-
2.	II	15	15
3.	III	18	18
4.	IV	6	6
Jumlah		39	39

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

3. Pegawai Berdasarkan Penempatan dimasing-masing Bidang

No.	Bidang	Jabatan	Jumlah
-----	--------	---------	--------



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

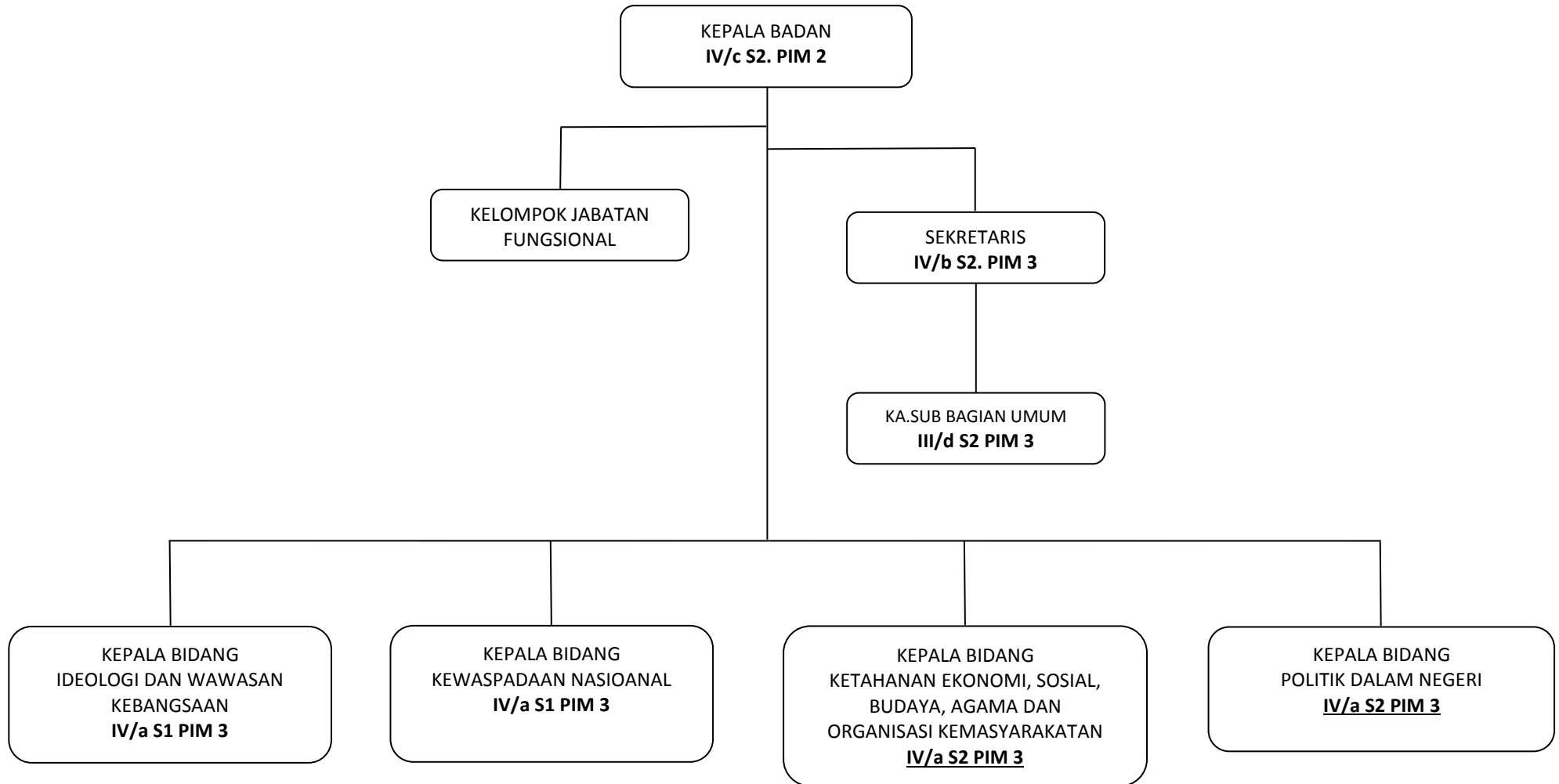
Website : <http://kesbangpol.samarindakota.go.id/>

1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1 Orang
2.	Sekertariat	Sekertaris	1 Orang
		Subbag	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	22 Orang 26
3.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	7 Orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri	Kepala Bidang	1 Orang 10
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
5.	Bidang Ekososbud	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	2 Orang 14
		Staf	11 Orang 23
6.	Bidang Kewaspadaan Nasional	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
Jumlah			73

Struktur Organisasi Terlampir

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA





4. Sarana Dan Prasarana

Guna mendukung kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah pula dilengkapi dengan sarana dan prasarana baik dalam bentuk aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, inventaris serta fasilitas lainnya. Kesemua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

No	Bidang	Nilai Aktiva (Rp)
1.	Tanah	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	10.707.425.480,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.780.011.750,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,-
5.	Aset Tetap Lainnya	5.000.000,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
7.	Aset Lainnya	885.240.000,-
Jumlah Nilai Asset (Per 31 Desember 2023)		12.492.437.230,-

Sumber data : REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Infrastruktur pendukung lainnya yang juga diperlukan berupa sarana dasar seperti listrik, air bersih dan sarana telekomunikasi.

E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda isu strategis yang akan di capai mengacu pada isu strategis Renstra 2021-2026 yakni ***“Maraknya paham / ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat akses informasi yang bebas”***

1. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta



standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial, ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut berupaya menangani masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan komunitas intelegen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri di daerah.

Terkait dengan tugas lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memverifikasi bantuan untuk Partai Politik ataupun Organisasi, memberikan Surat Keterangan Melapor (SKM) bagi organisasi, rekomendasi untuk ijin keramaian, rekomendasi pemasangan spanduk dan rekomendasi penelitian.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

2. Permasalahan Utama

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya identifikasi factor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:



a. Faktor Internal

1) Kekuatan

- Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- Adanya sarana dan prasarana yang cukup

2) Kelemahan

- Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPD
- Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bias dilaksanakan secara maksimal.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang

- Stabilitas daerah yang cukup kondusif
- Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
- Banyaknya organisasi di masyarakat
- Kerjasama yang baik antar instansi vertikal
- Tersedianya pedoman untuk acuan



2) Ancaman

- Adanya potensi terjadinya konflik
- Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada
- Kenakalan remaja dan Narkoba

Identifikasi isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat juga diklasifikasi dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

1) Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	• Kinerja SDM yang belum maksimal dikarenakan volume dan beban kerja yang terbatas	• Peningkatan kualitas SDM. • Peningkatan kuantitas SDM. • Penambahan beban kerja dan kegiatan Bidang
Anggaran	• Anggaran biaya belum maksimal	• Peningkatan efektifitas penggunaan anggaran. • Penambahan anggaran
Sarana/Prasarana	• Kurangnya sarana dan prasarana operasional Badan	• Peningkatan kualitas/ kuantitas sarana/prasarana

2) Faktor Eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :



Faktor	Uraian	Isu
Politik/Organisasi	• Luasnya cakupan wilayah dan Kondisi geografis • Kinerja FKUB, FPK, FKDM, TKDD dan P4GN-PN yang masih rendah. • Pemberdayaan FKUB, FPK, FKDM, TKDD dan P4GN-PN yang belum maksimal • Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	• Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. • Upaya peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat • Penguatan kinerja FKUB, FPK, FKDM, TKDD dan P4GN-PN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menimbulkan tantangan tersendiri bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota . Adapun **permasalahan** yang dihadapi selama tahun 2023, antara lain :

1. Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih rendah.
3. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
4. Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.
6. Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri 4 (empat) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2023, isu strategis, aspek strategis,



permasalahan utama organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Memuat perencanaan strategis 2021-2026 indikator kinerja utama 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA,

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA 2021-2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4). Maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan sampai kepada pengukuran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Strategis merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2021-2026 dalam menghadapi berbagai persoalan/tantangan yang akan dihadapi.

2.1.1 Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Agar cara pandang jauh kedepan dan apa yang akan dicapai dapat eksis,antisipasi, dan inovatif maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban”

Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.



4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Di dalam Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melalui program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (sub kegiatan) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dapat menyatukan berbagai perbedaan keyakinan agama dan sedangkan Misi yang diemban terdapat pada Misi 3 (tiga) yaitu :

MISI - 3

Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat

terdapat pada Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
2. Terciptanya Pelayanan Prima bagi masyarakat



2.1.3 Sasaran Strategis

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sasaran strategi dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kualitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama selama 2021 – 2026 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel : 2.1
Hubungan Visi, Misi Walikota dengan Sasaran dan Tujuan OPD

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026		"TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"
MISI – 3	Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.	
No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menetapkan strategi dan arah kebijakan yang digambarkan pada table berikut :



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Website : <http://kesbangpol.samarindakota.go.id/>

Tabel : 2.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026		“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”		
MISI – 3		Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki Wawasan dan Karakter Kebangsaan.	Revolusi Mental

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 2.3
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra dan Target Kinerja
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2023

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026		“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”			
MISI – 3		Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham kegiatan Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial dibagi yang belum memahami di kalikan 100%	Persen	100%



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Website : <http://kesbangpol.samarindakota.go.id/>

**Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Target Kinerja Tahun Sebelumnya**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke		
					2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Jumlah yang memahami ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	Orang	-	500 orang	700 orang

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2023, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah seperti tabel berikut:

Tabel : 2.4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	25%
		Persentase jumlah Peserta Pendidikan, Pengembangan dan Budaya Politik	100%
		Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	13,41%
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	35%
		Persentase penanganan kasus konflik social di masyarakat	20%



2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Walikota Samarinda selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel ; 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 Orang	Sosialisasi dan Dialog 5 Kali Pelaksanaan dan Peserta Lomba 2 kali (Peserta 1075)	100%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	Dalam Rangka Peringatan Lahirnya Pancasila (1 kali Pelaksanaan) Monev. 11 kali	100%
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	Bantuan untuk 10 Partai Politik	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2450 Orang	Sosialisasi Pendidikan Politik 17 Kali Pelaksanaan (Peserta 2975)	100%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Pemantauan, Perkembangan Politik Daerah (TP3D) 45 Orang (1 tim) 12 laporan	100%



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Website : <http://kesbangpol.samarindakota.go.id/>

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	Silaturahmi Paguyuban se Kota Samarinda 1 Kali Pelaksanaan (20 Paguyuban = 465 orang) Sosialisasi Pemilu untuk Ormas 1 Kali (peserta 75)	90%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 12 kali	24%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	Sosialisasi P4GN 1 Kali Pelaksanaan (Peserta 150) Sosialisasi FKUB 1 kali (peserta 70)	36,67%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 12 Laporan	60%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 Orang	Sosialisasi 1 Kali Pelaksanaan (Peserta 100) Rapat Teknis 5 kali (Peserta 30) peserta rapat (FKDM 4 kali (40 org), PORA 5 kali (45 org), WASDIN 5 kali (30 org), Rapat Penanganan Konflik 13 kali (40 org)	38%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik 13 kali (40 orang)	92,86%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	Rapat FORKOPIMDA 12 kali	100%



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Website : <http://kesbangpol.samarindakota.go.id/>

	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	475.000.000,-	APBD 2023
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.724.053.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	150.000.000,-	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	500.000.000,-	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	11.425.000.000,-	
Jumlah		23,274,053,000,-	

Pada tahun 2023, terjadi perubahan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Namun, untuk sasaran dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel ; 2.6
 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.577.172.500,-	APBD 2023
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	39.471.344.145,-	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	550.000.000,-	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.907.091.000,-	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	12.966.943.500,-	
Jumlah		56,472,551,145,-	



2.5 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.5
 Program dan Kegiatan Tahun 2023
 Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2		Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Website : <http://kesbangpol.samarindakota.go.id/>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda.

Suatu kewajiban setiap OPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) dimana laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :



Tabel : 3.1
 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$85 \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq 85$	Baik
$55 \leq 70$	Cukup
< 50	Kurang

3.1.1 Capaian Kinerja

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026

Capaian Kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 3.2
 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Tingkat Capaian			
						SB	B	C	K
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	25%	23,518%	94.07%	94.07%	-	-	-
		Persentase jumlah Peserta Pendidikan, Pengembangan dan Budaya Politik	100%	99,2%	99,2%	99,2%	-	-	-
		Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	13,41%	12,17%	90.73%	90.73%	-	-	-
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	35%	33,087%	94,53%	94,53%	-	-	-
		Persentase penanganan kasus konflik social di masyarakat	20%	3,66%	18,30%	-	-	-	18,30%



- ✚ Indikator Kinerja pada Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja 25% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 23		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi		
Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	Persen	20,83%	25%	23,51%	94,07%	2,68%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan” tahun 2023, realisasinya hampir sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana tahun 2023 ditargetkan sebesar 25% sedangkan realisasinya sebesar 23,51% dengan capaian kinerja sebesar 94,07%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan” antara tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :**

Tabel : 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023 dengan Realisasi dari Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	100%	97,23%	98,90%	94,07%



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan. Pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 94,07% dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 98,90% atau sebesar (4,83%). Dari segi capaian indikator kinerja pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan menunjukkan keberhasilan. Capaian indikator kinerja pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan tahun 2022 sebesar 98,90% sementara di tahun 2021 menurun sebesar 97,23% atau sebesar (1,67%). Tingkat penurunan capaian indikator Program Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan disebabkan terbatas dana APBD dari Pemerintah Kota Samarinda.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2026

Indikator kinerja Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2023 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2022, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	30%	23,51%	94.07%



Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan pertahun sampai dengan 2023 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 30% telah terealisasi sebesar 23.51% atau capaian kinerja sebesar 94,07%.

- ✚ Indikator Kinerja pada Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 23		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi		
Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	Persen	99,79%	100%	99,2%	99,2%	0,59%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik” tahun 2023, realisasinya hampir sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana tahun 2023 ditargetkan sebesar 100 % sedangkan realisasinya sebesar 99,2 % dengan capaian kinerja sebesar 99,2%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik” antara tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :**



Tabel : 3.2
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Tahun 2023 dengan Realisasi dari Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	99,83%	99,79%	99,2%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan. Sosialisasi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 99,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 99,79% atau sebesar (0,59%). Dari segi capaian indikator sosialisasi Pendidikan Politik Dalam Negeri menunjukkan keberhasilan. Capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 99,79% sementara di tahun 2021 meningkat sebesar 99,83% atau sebesar (0,04%). Tingkat penurunan capaian indikator Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik disebabkan terbatas dana APBD dari Pemerintah Kota Samarinda.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2026

Indikator kinerja Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2023 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2022, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini:



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	99,2%	99,2%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik pertahun sampai dengan 2023 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 100% telah terealisasi sebesar 99,2% dengan capaian kinerja sebesar 99,2%.

✚ Indikator Kinerja pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dengan capaian kinerja 14,63% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 23		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi		
Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	Persen	13,41%	14,63%	13,274%	90,73%	0,136%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan” tahun 2023, realisasinya hampir sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana tahun 2023 ditargetkan sebesar 14,63% sedangkan realisasinya sebesar 13,274% dengan capaian kinerja sebesar 90,73%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang



diberdayakan” antara tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023 dengan Realisasi dari Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	100%	95,11%	100%	90.73%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan. Pada tahun 2023, sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 90,73% mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 100% (9,27%). Dari segi capaian indikator kinerjanya, capaian indikator pemahaman mengenai Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan. Capaian indikator kinerja pemahaman mengenai sosialisasi UU ke Ormasan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2022 sebesar 100% sementara di tahun 2021 menurun sebesar 95,11% (4,89%) Tingkat penurunan capaian indikator Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan disebabkan terbatas dana APBD dari Pemerintah Kota Samarinda.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2026

Indikator kinerja Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2023 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2022, yang tidak perlu lagi dijumlahkan



dengan realisasi kinerja pada tahun 2021. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	16,34%	13,274%	90.73%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan pertahun sampai dengan 2023 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 16,34% telah terealisasi sebesar 13,274% dengan capaian kinerja sebesar 90,73%.

Indikator Kinerja pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan capaian kinerja 35% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 23		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya/	Persen	28,286%	35%	33,087%	94,53%	4,801%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya” tahun 2023, realisasinya hampir sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana tahun 2023 ditargetkan sebesar 35% sedangkan realisasinya sebesar 33,087% dengan capaian kinerja sebesar 94,53%.



- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya” antara tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023 dengan Realisasi dari Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	97,65%	94,29%	94,53%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan. Pada tahun 2023, pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 94,53% mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 94,29% (0,24%). Dari segi capaian indikator kinerjanya, capaian indikator mengenai Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya menunjukkan keberhasilan. Capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 94,29% sementara di tahun 2021 meningkat sebesar 97,65% (3,36%).

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2026

Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2023 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada



tahun 2022, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	39%	33,087%	94,53%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya pertahun sampai dengan 2023 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 39% telah terealisasi sebesar 33,087% dengan capaian kinerja sebesar 94,53%.

✚ Indikator Kinerja pada Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan capaian kinerja 20% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 23		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi		
Persentase penanganan kasus konflik sosial di Masyarakat	Persen	17,748%	20%	3,66%	18,30%	14,088%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat” tahun 2023, realisasinya mengalami penurunan dengan target telah yang ditetapkan. Dimana tahun 2023 ditargetkan



sebesar 20% sedangkan realisasinya sebesar 3,66% dengan capaian kinerja sebesar 18,30%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat” antara tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:**

Tabel : 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023 dengan Realisasi dari Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat	100%	100%	88,74	18,30%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dari tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, pembinaan Bidang Kewaspadaan Nasional sebesar 18,30% mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 88,74% (70,44%). Dari segi capaian indikator kinerja, capaian indikator mengenai Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat tidak menunjukkan keberhasilan. Capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 88,74% sementara di tahun 2021 meningkat sebesar 100% (11,26%).

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2026**

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif,



sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2023 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2022, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat	20%	3,66%	18,30%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat pertahun sampai dengan 2023 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 20% telah terealisasi sebesar 3,66% dengan capaian kinerja 18,30%.

3.1.2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial di Kota Samarinda pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah melakukan tindakan preventif terhadap peningkatan Pembinaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya;



3. Adanya koordinasi dengan aparat Kepolisian, Dandim dan Kejaksaan dalam menangani masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi.
4. Pelaksana kegiatan memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
5. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas yang bagus dalam pelaksanaan program/kegiatan, hingga pelaksanaannya bisa terarah dan relevan antara target dan pagu anggaran yang tersedia.
6. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang selaras dengan usaha pencapaian target masing masing kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi Dalam meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami kewaspadaan nasional, terdapat beberapa factor (*kendala/kegagalan*) yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, antara lain:

1. Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bias dilaksanakan secara maksimal.
2. Waktu APBD-Perubahan yang sangat dekat dengan akhir tahun anggaran.
3. Adanya Perubahan Perwali yang membutuhkan waktu untuk perubahan SK yang diterbitkan.
4. Adanya Perubahan pada pihak ke 3 tentang kenaikan harga pengadaan barang.
5. Adanya penetapan jenis target kinerja dan jumlah volume yang kurang tepat, dimana dalam realisasi pelaksanaannya jenis dan volume yang dihasilkan berbeda, sehingga menyebabkan ada ketidaksesuaian antara target dengan realisasi.

Untuk menghadapi hambatan diatas, solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja persentase penurunan kasus konflik khususnya pemanfaatan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kepolisian, TNI, Kajari, dan



BIN serta tokoh masyarakat untuk melakukan pencegahan kasus konflik dan lainnya.

Meskipun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda belum memenuhi target, namun tetap berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dan pencarian solusi. Adapun *solusi* yang telah dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada.
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing.
3. Setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran ke dalam kegiatan (penyusunan rincian belanja).
4. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada SKPD, sering terjadi keadaan di SKPD dimana target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada SKPD oleh Pemerintah Kota jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh SKPD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.



3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Secara rinci jumlah anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam penggunaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Persentase (%)
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	1,577,172,500	1,483,667,891	94.07%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,577,172,500	1,483,667,891	94.07%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	1,498,706,000	1,411,386,391	94.17%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	78,466,500	72,281,500	92.12%
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	39,471,344,145	39,155,643,588	99.20%



No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Persentase (%)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	39,471,344,145	39,155,643,588	99.20%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	30,889,546,145	30,889,544,945	100%
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7,225,184,000	6,939,915,843	96.05%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,356,614,000	1,326,182,800	97.76%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	550,000,000	499,008,850	90.73%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	550,000,000	499,008,850	90.73%



No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Persentase (%)
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	275,000,000	266,007,100	96.73%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	275,000,000	233,001,750	84.73%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	1,907,091,000	1,802,799,659	94.53%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,907,091,000	1,802,799,659	94.53%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	407,091,000	394,264,400	96.85%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,500,000,000	1,408,535,259	93.90%
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	12,966,943,500	2,372,426,704	18.30%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	12,966,943,500	2,372,426,704	18.30%



No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Persentase (%)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	961,037,500	899,066,694	93.55%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	175,000,000	174,639,750	99.79%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11,830,906,000	1,298,720,260	10.98%
Jumlah Alokasi Anggaran			56,472,551,145	45,313,546,692	80,24%

3.2.2 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Serapan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja

Dari keseluruhan pagu anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2023 sebesar Rp. **56,472,551,145,-** (lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar 80,24% atau sebesar Rp. **45,313,546,692,-** (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode 2023 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di atas 80,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2021-2026 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.



Persentase penyerapan anggaran pada masing-masing program yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2023 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja seperti pada table berikut :

Tabel.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman meng/ena ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	100%	94.07%	5,93%
	Persentase jumlah Peserta Pendidikan, Pengembangan dan Budaya Politik	100%	99.20%	0,8%
	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	100%	90.73%	9,72%
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	94.53%	5,47%
	Persentase penanganan kasus konflik social di masyarakat	100%	18.30%	81,7%
Jumlah Total Efisiensi				103,62%
Rata-rata efisiensi per indicator				20,724%

Dari uraian pada table diatas tergambar kondisi pencapaian indikator kinerja sasaran tingkat capaiannya 100% sesuai dengan target dan juga terdapat efisiensi anggaran sebesar 103,62%.

Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2023 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja seperti pada table berikut :



Tabel. 3.8
 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2023
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)	Target Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Efisiensi Penggunaan Dana	Persentase (%)
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	100%	94.07%	94.07%	1,577,172,500	1,483,667,891	93,504,609	94.07%
	Persentase jumlah Peserta Pendidikan, Pengembangan dan Budaya Politik	100%	99.20%	99.20%	39,471,344,145	39,155,643,588	315,700,557	99.2%
	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	100%	90.73%	90.73%	550,000,000	499,008,850	50,991,150	90.73%
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	94.53%	94.53%	1,907,091,000	1,802,799,659	104,291,341	94.53%
	Persentase penanganan kasus konflik social di masyarakat	100%	18.30%	18.30%	12,966,943,500	2,372,426,704	10,594,516,796	18.30%
TOTAL					56.472.551.145	45.313.546.692	11.159.004.453	80,24%

Terdapat efisiensi sejumlah Rp 11.159.004.453,- pada pelaksanaan anggaran untuk sasaran berupa meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial, hal tersebut disebabkan karena adanya Perubahan Perwali tentang SK Tim dan efisiensi waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan, dengan anggaran capaian kinerja tercapai 80,24%.



b. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 5 (lima) Program dan 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **56,472,551,145,-** (lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **45,313,546,692,-** (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 80,24% dengan rincian per program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

✚ Indikator kinerja Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat, didukung oleh Program :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kota Samarinda, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. **1,577,172,500,-** (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **1,483,667,891,-** (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau **94.07%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2023 terdapat penambahan anggaran, penambahan ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebesar Rp. 1,098,706,000,- dengan rincian sebagai berikut :



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	475,000,000	1,577,172,500	1,483,667,891	94.07%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400,000,000	1,498,706,000	1,411,386,391	94.17%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75,000,000	78,466,500	72,281,500	92.12%
Total	475,000,000	1,577,172,500	1,483,667,891	94.07%

- Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,577,172,500,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 1,483,667,891,- atau 94,07 persen, dengan realisasi indikator kinerja kegiatan jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebanyak 700 peserta dan 12 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp 1,577,172,500,-)	Rp. 1,577,172,500,-	Rp. 1,577,172,500,- (94,07%)
Output	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Jumlah laporan	700 orang dan 12 laporan	700 orang dan 12 laporan
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	100%

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Pada sub kegiatan ini



pagu anggaran sebesar Rp. 1,498,706,000,- terealisasi sebesar Rp. 1,411,386,391,- atau 94.17 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebanyak 1075 peserta melebihi dari target kinerja tahun 2023 yakni 700 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 1,498,706,000,-	Rp. 1,498,706,000	Rp. 1,411,386,391,- (94,17%)
Output	Jumlah peserta Sosialisasi dan Dialog serta jumlah peserta Lomba	700 Orang	Sosialisasi dan Dialog 5 Kali Pelaksanaan dan Peserta Lomba 2 kali (Peserta 1075)
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	100%

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 78,466,500 terealisasi sebesar Rp. 72,281,500,- atau 92.12 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun sebanyak 5 Laporan kurang dari target kinerja tahun 2023 yakni 12 Laporan.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 2,749,000,-)	Rp. 2,749,000,-	Rp. 2,749,000,- (92,12%)
Output	Jumlah laporan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Peringatan Lahirnya Pancasila	12 Laporan	Dalam Rangka Peringatan Lahirnya Pancasila (1 kali Pelaksanaan) Monev. 11 kali
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	100%



✚ Indikator Kinerja Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik, didukung oleh Program :

- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. **39,471,344,145,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **39,155,643,588,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau **99.2%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2023 terdapat Penambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Dana Hibah untuk KPU dan BAWASLU Kota Samarinda sebesar Rp. 28,779,546,145,- dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10,724,053,000	39,471,344,145	39,155,643,588	99.2%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2,110,000,000	30,889,546,145	30,889,544,945	100%



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7,890,503,000	7,225,184,000	6,939,915,843	96.05%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	723,550,000	1,356,614,000	1,326,182,800	97.76%
Total	10,724,053,000	39,471,344,145	39,155,643,588	99.2%

- Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan pagu anggaran sebesar Rp. **39,471,344,145,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. **39,155,643,588,-** atau 99,2 persen, dengan realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan sebanyak, 10 Parpol, 3800 peserta, dan 12 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 39,471,344,145,-)	Rp. 39,471,344,145,-	Rp. 39,155,643,588,- (99,2%)
Output	Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik dan jumlah berkas verifikasi	10 Parpol, 3800 orang, 12 laporan	10 Parpol, 3800 orang, 12 laporan
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpol yang diverifikasi	100%	100%



- a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 30,889,546,145,- terealisasi sebesar Rp. 30,889,544,945,- atau 100 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun sebanyak 10 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 30,889,546,145,-)	Rp. 30,889,546,145,-	Rp. 30,889,544,945,- (100%)
Output	Jumlah Berkas Partai Politik Penerima Bantuan keuangan yang diverifikasi	10 Dokumen	Bantuan untuk 10 Partai Politik
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100%	100%

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 7,225,184,000,- terealisasi sebesar Rp. 6,939,915,843,- atau 96.05 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sebanyak 2975 peserta melebihi dari target kinerja tahun 2023 yakni 2450 peserta.



Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 7,225,184,000,-)	Rp. 7,225,184,000,-	Rp. 6,939,915,843,- (96,05%)
Output	Jumlah peserta Diskusi Politik dan sosialisasi politik	2450 Orang	Sosialisasi Pendidikan Politik 17 Kali Pelaksanaan (Peserta 2975)
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100%	100%

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 1,356,614,000,- terealisasi sebesar Rp. 1,326,182,800,- atau 97,76 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 12 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1,356,614,000,-)	Rp. 1,356,614,000,-	Rp. 1,326,182,800,- (97,76%)
Output	Jumlah laporan Tim Monitoring Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D)	12 Laporan	Pemantauan, Perkembangan Politik Daerah (TP3D) 45 Orang (1 tim) 12 laporan
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100%	100%

- ✚ Indikator Kinerja Persentase jumlah ormas yang di berdayakan, didukung oleh Program :

- 3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2023



sebesar Rp. 550,000,000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 499,008,850,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 90.73% dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2023 terdapat Penambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pemeliharaan Religi Senter Samarinda sebesar Rp. 400.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	150,000,000	550,000,000	499,008,850	90.73%
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75,000,000	275,000,000	266,007,100	96.73%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75,000,000	275,000,000	233,001,750	84.73%
Total	150,000,000	550,000,000	499,008,850	90.73%

- Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 550,000,000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 499,008,850,- atau 90,73 persen, dengan realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah Ormas yang dibina sebanyak 23 Ormas, 600 peserta dan 50 laporan sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 550.000.000,-)	Rp. 550.000.000,-	Rp. 499,008,850,- (90,73%)
Output	Jumlah pembinaan Ormas dan jumlah laporan	23 Ormas 600 peserta dan 50 laporan	23 Ormas 600 peserta dan 50 laporan
Outcome	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan yang dibina	100%	100%

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 275,000,000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 266,007,100,- atau 96,73 persen, serta pada indikator kinerja kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 465 peserta tidak memenuhi target dari target kinerja tahun 2023 yakni 600 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 275.000.000,-)	Rp. 275.000.000,-	Rp. 266,007,100,- (96,73%)
Output	Jumlah peserta silaturahmi Paguyuban dan sosialisasi Pemilu untuk Ormas	600 Orang	Silaturahmi Paguyuban se Kota Samarinda 1 Kali Pelaksanaan (20 Paguyuban = 465 orang) Sosialisasi Pemilu untuk Ormas 1 Kali (peserta 75)
Outcome	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan yang dibina	100%	100%

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 275,000,000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 233,001,750,- atau 84,73 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,



Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 12 laporan tidak memenuhi target kinerja tahun 2023 yakni 20 laporan.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 275.000.000,-)	Rp. 275.000.000,-	Rp. 233,001,750,- (84.73%)
Output	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 12 Laporan
Outcome	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan yang dibina	100%	100%

✚ Indikator Kinerja Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan, didukung oleh Program :

- 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. **1,907,091,000,-** (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **1,802,799,659,-** (Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau **94.53%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2023 terdapat Penambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pemeliharaan Religi Senter Samarinda sebesar Rp. **1,407,091,000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	500,000,000	1,907,091,000	1,802,799,659	94.53%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250,000,000	407,091,000	394,264,400	96.85%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250,000,000	1,500,000,000	1,408,535,259	93.90%
Total	500,000,000	1,907,091,000	1,802,799,659	94.53%

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 1,907,091,000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 1,802,799,659,- atau 94,53 persen, serta pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 35 laporan dan 600 peserta sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1,907,091,000,-)	Rp. 1,907,091,000,-	Rp. 1,802,799,659,- (94,53%)
Output	Jumlah laporan dan peserta sosialisasi	35 laporan dan 600 peserta sosialisasi	35 laporan dan 600 peserta sosialisasi
Outcome	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan meningkat	100%	100%

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 407,091,000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 394,264,400,- atau 96,85 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di



Daerah sebanyak 220 peserta tidak memenuhi target kinerja tahun 2023 yakni 600 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 275.000.000,-)	Rp. 275.000.000,-	Rp. 233,001,750,- (96,85%)
Output	Jumlah peserta sosialisasi	600 Orang	Sosialisasi P4GN 1 Kali Pelaksanaan (Peserta 150) Sosialisasi FKUB 1 kali (peserta 70)
Outcome	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan meningkat	100%	100%

- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 1,500,000,000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 1,408,535,259,- atau 93,90 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 12 laporan tidak memenuhi target kinerja tahun 2023 yakni 20 laporan.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1.500.000.000,-)	Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 1,408,535,259,- (93,90%)
Output	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 12 Laporan
Outcome	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan meningkat	100%	100%

✚ Indikator Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti, didukung oleh Program :

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, program ini dijabarkan dalam



1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. **12,966,943,500,-** (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **2,372,426,704,-** (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) atau **18.30%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2023 terdapat Penambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Sosialisasi ORMAS sebesar Rp. **1,541,943,500,-** dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	11,425,000,000	12,966,943,500	2,372,426,704	18.30%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250,000,000	961,037,500	899,066,694	93.55%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	175,000,000	175,000,000	174,639,750	99.79%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11,000,000,000	11,830,906,000	1,298,720,260	10.98%
Total	11,425,000,000	12,966,943,500	2,372,426,704	18.30%

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **12,966,943,500,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. **2,372,426,704,-** atau 18,30 persen, serta pada indikator kinerja kegiatan Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani sebanyak 24 kasus, 750 peserta sosialisasi dan 12 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 12,966,943,500,-)	Rp. 12,966,943,500,-	Rp. 2,372,426,704,- (18,30%)
Output	Jumlah kasus, jumlah peserta sosialisasi dan jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	24 kasus, 750 peserta sosialisasi dan 12 laporan	24 kasus, 750 peserta sosialisasi dan 12 laporan
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100%	100%

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 961,037,500,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 899,066,694,- atau 93,55 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga



Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 285 peserta tidak memenuhi target kinerja tahun 2023 yakni 750 peserta

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 961,037,500,-)	Rp. 961,037,500,-	Rp. 899,066,694,- (93,55%)
Output	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rapat Teknis, FKDM, PORA, WASDIN dan Rapat Penanganan Konflik	750 Orang	Sosialisasi 1 Kali Pelaksanaan (Peserta 100) Rapat Teknis 5 kali (Peserta 30) peserta rapat (FKDM 4 kali (40 org), PORA 5 kali (45 org), WASDIN 5 kali (30 org), Rapat Penanganan Konflik 13 kali (40 org)
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100%	100%

- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 174,639,750,- atau 99,79 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 13 laporan tidak memenuhi target kinerja tahun 2023 yakni 14 laporan.



Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 175.000.000,-)	Rp. 175.000.000,-	Rp. 174,639,750,- (99,79%)
Output	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik	14 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik 13 kali (40 orang)
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100%	100%

- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 11,830,906,000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 1,298,720,260,- atau 10,98 persen, serta pada indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 12 dokumen melebihi dari target kinerja tahun 2023 yakni 11 dokumen.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 11,830,906,000,-)	Rp. 11,830,906,000,-	Rp. 1,298,720,260,- (10,98%)
Output	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Forkompinda	11 Dokumen	Rapat FORKOPIMDA 12 kali
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100%	100%



BAB IV

PENUTUP

SIMPULAN UMUM

Pada uraian Bab III terdapat bahwa : 1 (satu) indikator sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja program dapat dicapai dengan **BAIK**.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah berupaya memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang disajikan melalui hasil dari pengukuran kinerja tahun 2023 yang terdiri dari 5 (lima) program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan mencapai realisasi (94,07%)
2. Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mencapai realisasi (99,20%)
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencapai realisasi (90,73%)
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya mencapai realisasi (94,53%)
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial mencapai realisasi (18,30%)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda akan melakukan perbaikan dan koordinasi lebih lanjut terhadap capaian indikator yang belum dapat terlaksana. Hal ini juga disebabkan karena faktor eksternal maupun internal. Perbaikan atas sistem pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi secara intensif antar bidang dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi APBD Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat tercapai.
- c. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan melakukan berbagai sosialisasi atau melalui forum-forum yang sudah dibentuk.



Mudah-mudahan perbaikan ditahun berikutnya akan lebih meningkatkan kapasitas kelembagaan baik itu sumber daya manusianya, sarana prasarana dan pendanaan yang cukup. Demikian pula dapat diharapkan meningkatkan capaian yang lebih baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mengucapkan terima kasih pada segenap jajarannya dan pada inspektorat daerah atas koreksi-koreksi ataupun penilaian yang diberikan dalam pembuatan LKJiP ini agar lebih baik, karena LKJiP ini adalah suatu kewajiban setiap OPD sebagai bahan pertanggung jawaban publik yang transparan dan akuntabel disamping sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Meskipun kami menyadari dalam penyusunan LKJiP ini masih ada saja kekurangan, namun demikian kami akan berusaha untuk lebih menyempurnakannya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Tim Penyusun

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,

SUCIPTO, S.Pd.M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003